

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timur Tengah saat ini kembali bergejolak, dimana konflik-konflik terdahulu seperti konflik Suriah, Palestina, maupun terorisme belum selesai, sekarang wilayah Timur Tengah bagian selatan kembali menuai konflik dimana mayoritas Negara di Timur Tengah bersama-sama memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, terutamanya Arab Saudi yang bertindak sebagai aktor utama pemutusan hubungan diplomasi dan pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar.

Sebenarnya, konflik yang terjadi antara Arab Saudi serta beberapa Negara-negara Teluk dengan Qatar telah terjadi sejak beberapa dekade lalu. Namun, sebelum konflik ini terjadi, Qatar sempat memiliki hubungan yang cukup baik dengan Arab Saudi dan Negara-negara Teluk dengan membentuk Gulf Cooperation Council (Dewan Kerjasama Teluk).

Pembentukan GCC terutama didasarkan pada kekhawatiran Negara-negara anggotanya terhadap “ancaman Iran”. Yang dimaksud “ancaman Iran” adalah kemungkinan meluasnya pengaruh revolusi Iran dan kemungkinan kemenangan Iran dalam Perang Teluk I (Perang Iran-Irak, 1980-1988). Iran memang memandang GCC sebagai sarana untuk menutupi ekspansi pengaruh Arab Saudi. Iran juga memandang GCC sebagai sebuah instrumen bagi kebijakan Amerika Serikat di Teluk, sebagaimana dulu Negara-negara Arab “radikal” memandang Iran di bawah Shah (Sihbudi, 2007).

Sebelumnya, Arab Saudi dan Negara-negara Teluk memiliki hubungan yang baik dengan Qatar dan dapat dikatakan Arab Saudi dekat dengan Qatar pada masa kepemimpinan emir Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani. Khalifa bin Hamad Al Thani sendiri dikenal sebagai sosok yang pro dengan Arab Saudi, namun pasca Khalifa bin Hamad Al

Thani di kudeta dari jabatannya, hubungan Arab Saudi dengan Qatar mulai memburuk.

Pemutusan hubungan diplomatik ini dimulai pada 05 Juni 2017 dimana beberapa Negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Libya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar secara tiba-tiba. Kemudian tidak lama kemudian pemutusan hubungan diplomatik ini diikuti juga oleh Maladewa dan Yaman (Wadrianto, 2017).

Negara-negara tersebut memberlakukan penarikan duta besar mereka yang berada di Qatar, memberlakukan larangan perdagangan dan perjalanan dari maupun ke Qatar, serta menyerukan kepada warga Negara Qatar untuk meninggalkan Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam tenggat waktu dua pekan (Dewi, 2017).

Namun, tidak semua Negara-negara di Timur Tengah mengikuti pemutusan hubungan dan pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar yang dipelopori oleh Arab Saudi. Salah satunya adalah dua Negara anggota Dewan Kerjasama Kawasan Teluk, Kuwait dan Oman, dimana kedua Negara tersebut terutamanya Kuwait berusaha untuk melakukan perundingan mediasi damai antara Qatar dan Arab Saudi untuk menurunkan ketegangan di kawasan Timur Tengah (Sinaga, 2017).



Gambar 1. 1 Peta Hubungan Diplomatik Qatar

Sumber : (Permadi, 2017)

Pada Maret 2014, Arab Saudi menarik duta besarnya dari Qatar, dan Arab Saudi juga mengajak Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk ikut serta menekan Qatar. Namun setelah 8 bulan, hubungan Qatar dengan Negara-negara anggota GCC sempat kembali membaik (Nurjanah & Permadi, 2017).

Faktor lainnya yang menyebabkan pemberian sanksi ekonomi ini adalah Arab Saudi menganggap bahwa Qatar memberikan dukungan dan bantuan kepada organisasi-organisasi teroris. Orang-orang kaya di Qatar diyakini memberikan sumbangan besar kepada ISIS, sementara pemerintah Qatar memberi bantuan uang dan senjata kepada kelompok Islam garis keras di Suriah (BBC, Tujuh negara Arab putus hubungan diplomatik: Ada apa dengan Qatar?, 2017).

Qatar juga dituduh memiliki hubungan dengan kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Front al Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaida serta mendukung Ikhwanul Muslimin yang dilarang di berbagai Negara Arab, dan bahwa Qatar terus menerus mempromosikan pesan dan gagasan kelompok-kelompok ini melalui media mereka seperti Al Jazeera (BBC, Tujuh negara Arab putus hubungan diplomatik: Ada apa dengan Qatar?, 2017).

Ada 13 tuntutan yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Qatar agar sanksi ekonomi Qatar dicabut, yaitu:

1. Mengurangi hubungan dengan Iran;
2. Menutup sebuah pangkalan militer Turki yang berada di wilayah Qatar;
3. Qatar harus menutup stasiun televisi Al Jazeera karena dianggap sebagai media untuk teroris menyebarkan propagandanya;
4. Memutuskan semua hubungan dengan organisasi terorisme;
5. Menutup kantor berita yang didanai oleh Qatar secara langsung maupun tidak langsung;

6. Menghentikan seluruh pendanaan kepada individu, kelompok ataupun organisasi yang dianggap teroris oleh Arab Saudi;
7. Menyerahkan tokoh teroris yang dicari oleh Arab Saudi dan sekutunya;
8. Tidak ikut campur ke dalam urusan Negara berdaulat;
9. Menghentikan seluruh kontak dengan oposisi Arab Saudi;
10. Membayar kompensasi atas hilangnya nyawa serta kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir;
11. Menaati kebijakan kerjasama yang dibuat Arab Saudi pada 2014;
12. Setujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari sejak diserahkan ke Qatar;
13. Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan (APnews, 2017).

Namun, Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan Arab Saudi, Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani (direktur kantor komunikasi Qatar) berkata "Mereka tidak ingin kita membuat keputusan, mereka ingin membuat keputusan untuk kita, mereka pikir kami akan menyerah dan melakukan apa yang mereka katakan kepada kita. Itu tidak akan pernah terjadi" (Trofimov, 2018).

Disamping itu, Iran juga turut menyerukan dukungannya terhadap Qatar dalam pembicaraan Presiden Iran, Hassan Rouhani dengan Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Hassan Rouhani mengatakan "Teheran berdiri dengan Negara dan pemerintah Qatar. Kami percaya bahwa jika ada konflik antara Negara-negara di kawasan, maka tekanan, ancaman atau sanksi bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan" (Deutsche Welle, Krisis Diplomatik Arab: Iran Dukung Qatar, AS Usulkan Dialog, 2017)

Dampaknya sendiri bagi Qatar tentu saja sangat terasa, salah satunya adalah sulitnya pasokan pangan di Qatar. 80% pasokan pangan Qatar sendiri selama ini berasal dari Negara-negara Teluk, sehingga pada saat pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar truk-truk pengirim pasokan makanan ke Qatar tertahan di perbatasan Arab Saudi dan dilarang untuk masuk ke Qatar. Dampak lain yaitu penerbangan Qatar dilarang untuk mendarat maupun melintasi wilayah udara dari Bahrain, Arab Saudi dan Mesir, sehingga penerbangan Qatar harus dialihkan melalui jalur lain yang lebih jauh dan mengurangi pemasukan bagi Qatar (Priyambodo, 2017). Namun, walaupun sanksi ekonomi tersebut memberikan dampak yang cukup besar, Qatar mampu bertahan menghadapi sanksi ekonomi tersebut. Para ahli memperkirakan Qatar akan mengalami krisis, tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena Qatar malah mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi, dimana GDP Qatar tumbuh sesuai target 2,4% pada 2018 dari 1,6% pada 2017 menurut International Monetary Fund (Etehad, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

“Mengapa sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar tahun 2017-2018 tidak efektif?”

C. Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah suatu tindakan (hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, selain itu juga berarti suatu tindakan (ekonomi) sebagai hukuman kepada suatu negara (KBBI, 2016).

Ada berbagai macam jenis sanksi seperti sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi ekonomi, dan lainnya. Dalam hubungan antar Negara terdapat 2 jenis sanksi, yang pertama merupakan sanksi internasional, yaitu suatu langkah atau hukuman yang diberikan oleh suatu Negara ataupun oleh sekelompok Negara

terhadap Negara lain karena adanya suatu kepentingan politik. Kemudian ada sanksi perdagangan, sanksi ini berbeda dari sanksi ekonomi yang termasuk di dalam sanksi internasional karena sanksi ekonomi yang berlaku terlepas dari politik antar Negara yang semata-mata memang karena alasan ekonomi.

Dalam konflik antara Qatar dengan Arab Saudi ini terdapat 2 jenis sanksi internasional yang diberlakukan oleh Arab Saudi, yaitu : sanksi diplomasi dan sanksi ekonomi. Namun, sanksi ekonomi merupakan sanksi yang paling berdampak kepada Qatar karena jalur perekonomian Qatar ditutup dan mayoritas pasokan pangan Qatar berasal dari Arab Saudi dan Negara Teluk.

Sanksi Ekonomi

Menurut Johan Galtung sanksi ekonomi adalah suatu aksi yang diinisiasi oleh satu atau lebih aktor internasional (*sender*) terhadap aktor-aktor internasional lain (*receiver*) dengan salah satu atau bahkan keduanya dari dua tujuan berikut, yaitu *sender* memberikan hukuman dengan merampas hak *receiver* dan atau membuat *receiver* tersebut mau untuk mengikuti keinginan atau kebijakan yang dianggap penting oleh *sender* (Galtung, 1967, p. 379). Menurut Barry E. Carter, sanksi ekonomi adalah tindakan ekonomi yang dilakukan secara paksa kepada satu atau lebih Negara untuk memaksakan perubahan dalam kebijakan, atau menunjukkan pendapat Negara pemberi sanksi terhadap kebijakan dari Negara penerima sanksi (Carter, 1987, p. 1166). Barry E. Carter menyebutkan bahwa Negara yang memberikan sanksi biasanya disebut sebagai *sender*, dan Negara yang menerima sanksi disebut sebagai *target* (Carter, 1987, p. 1166).

Sementara itu, dalam penerapan sanksi ekonomi biasanya terdapat suatu kepentingan politik seperti *compliance*, yaitu kepentingan untuk memaksa *target* untuk mengubah kebijakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *sender* (Lindsay, 1986, p. 155).

Dalam *On the Effect of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia*, Johan Galtung menganalisa bahwa untuk mengukur keberhasilan sanksi, mampu dilihat dari reaksi-reaksi yang dilakukan Negara *target* untuk menanggulangi kerugian yang didapatkan. Reaksi-reaksi tersebut dapat sebagai berikut (1) *target* berusaha untuk melatih diri untuk beradaptasi dengan keadaan, (2) merestrukturisasi ekonomi nasional, seperti memproduksi sendiri komoditas impor, (3) menjalin hubungan dengan pihak ketiga (Galtung, 1967, pp. 387-388).

Menurut Maarten Smeets penggunaan sanksi ekonomi secara politis dapat menjadi alat kebijakan yang menarik dimana keefektifannya dapat diperdebatkan berdasarkan seberapa besar pengaruh sanksi ekonomi dalam mencapai perubahan kebijakan yang merupakan tujuan dari pemberian sanksi tersebut (Smeets, 2018, p. 15). Maka sanksi dapat dianggap efektif apabila tujuan dari *sender* memberikan sanksi kepada Negara *target* itu tercapai, misalnya seperti Negara *target* harus membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *sender* (Carter, 1987, p. 1170). Selain itu efektivitas sanksi juga berdasarkan dari ketergantungan Negara *target* terhadap Negara yang memberikan sanksi, dimana Negara *target* tersebut tidak dapat berbuat banyak ketika sanksi diberikan kepadanya karena ketergantungannya, sehingga ketergantungan tersebut dapat digunakan *sender* untuk memaksa *target* memenuhi tuntutananya (Roza, 2009).

Dalam kasus Qatar dan Arab Saudi, Qatar mendapatkan sanksi ekonomi yang cukup berat dari Arab Saudi dimana seluruh jalur perdagangan baik itu jalur udara, laut, dan darat diblokade serta ditutupnya ekspor dan impor terhadap Qatar di wilayah Teluk. Arab Saudi berperan sebagai *leading sender* atau Negara yang memimpin Negara-negara lain untuk memberikan sanksi, dimana Arab Saudi mengajak Negara-negara Teluk untuk bersama-sama memberikan sanksi kepada Qatar dengan dalih untuk menjaga stabilitas di kawasan Teluk. Harapannya, dengan pemberian sanksi ini maka stabilitas Qatar

akan terganggu dan Qatar akan menyerah serta mengikuti keinginan Arab Saudi.

Namun, sanksi yang diberikan oleh Arab Saudi ini dapat dikatakan tidak efektif karena tujuan dari pemberian sanksi ini sendiri tidak tercapai. Qatar tidak ingin mengubah kebijakannya untuk memutus hubungan dengan Iran, malah Qatar semakin menguatkan hubungan dengan mengangkat Mohammed Hamad Saad Al Fuhaid Al Hajri menjadi duta besar luar biasa untuk Iran dan menjalin kerjasama kedua Negara (Pars Today, Kerja Sama Iran-Qatar dan Konfrontasi Saudi, 2018) Selain itu, Qatar juga menjalin hubungan yang cukup dekat Turki dan Turki memberikan bantuan kepada Qatar seperti susu, yogurt, dan daging, selain itu Qatar dan Turki juga akan memperkuat kerjasama bilateral (Dikarma, 2019).

Selain memiliki hubungan yang dekat dengan Iran dan Turki, Qatar juga merupakan Negara dengan ekonomi yang kuat. Sumber ekonomi Qatar sendiri berasal dari cadangan gas alamnya, dimana Qatar merupakan Negara pengeskor gas alam cair (Liquified Natural Gas) terbesar di dunia, besarnya kuantitas produk LNG di Qatar didukung oleh adanya efisiensi produksi dan rendahnya biaya operasional sehingga harga produk tersebut lebih kompetitif di dunia internasional (Setiyo, 2017).

Selain itu Qatar juga membangun jalur perdagangan baru melalui Iran dan Turki, dimana kedua Negara tersebut bersedia memberikan alternatif akses udara dan darat serta tambahan akses laut oleh Iran. Disamping itu, Qatar juga mengembangkan peternakan sapi agar dapat memproduksi susu dan produk berbahan dasar susu yang selama ini diimpor dari Arab Saudi (Tempo.co, Penuhi Kebutuhan Susu, 4.000 Ekor Sapi Diterbangkan ke Qatar , 2017). Sehingga Qatar tidak memiliki ketergantungan kepada Arab Saudi karena masih bisa memenuhi kebutuhannya tanpa Arab Saudi, sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini sanksi ekonomi yang diberikan

Arab Saudi kepada Qatar tidak efektif dan Qatar mampu bertahan dari sanksi ekonomi Arab Saudi.

D. Hipotesis

Sanksi ekonomi terhadap Qatar oleh Arab Saudi dinilai tidak efektif karena Qatar tetap mampu merestrukturisasi ekonomi nasionalnya dengan cara :

1. Memproduksi sendiri komoditas impor.
2. Memberlakukan diversifikasi ekonomi.
3. Menjalin hubungan dengan pihak ketiga.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan Qatar.
2. Menganalisis mengapa sanksi ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar tidak efektif.
3. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Batasan Penelitian

Batasan penelitian skripsi yang berjudul “Ketidakefektifan Sanksi Ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar Tahun 2017-2018” dimulai dari tahun 2017 yang merupakan awal terjadinya konflik antara Qatar dengan Arab Saudi dan Negara-negara Timur Tengah, sampai dengan tahun 2018 yang mana konflik perpecahan antara Qatar dan Arab Saudi masih berjalan dan sanksi ekonomi masih diberlakukan.

G. Metodologi Penelitian

Dalam meneliti skripsi yang berjudul “Ketidakefektifan Sanksi Ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar Tahun 2017-2018” penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian tidak didapatkan melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya, melainkan melalui analisis data dan

studi literatur (Strauss & Corbin, 2003, pp. 4-5). Peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan dengan memanfaatkan berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, tesis, dokumen resmi, maupun artikel dari media cetak maupun online yang dapat menunjang analisis dari penulis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tentang Ketidakefektifan Sanksi Ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar Tahun 2017-2018 ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I, bab ini merupakan pendahuluan yang akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini berisi tentang profil Negara Arab Saudi dan profil Negara Qatar. Selain itu juga akan membahas tentang hubungan baik Arab Saudi dengan Qatar seperti kerjasama antara kedua Negara.

BAB III, bab ini membahas tentang hubungan buruk Arab Saudi dengan Qatar, dimulai dari pemutusan hubungan dengan Qatar oleh Arab Saudi, pemberian sanksi ekonomi oleh Arab Saudi terhadap Qatar, tuntutan Arab Saudi kepada Qatar, serta dampak dari sanksi ekonomi tersebut. Kemudian, bab ini juga akan membahas mengenai sanksi ekonomi Arab Saudi, reaksi Qatar, dan dampak sanksi tersebut bagi kedua Negara tersebut.

BAB IV, bab ini akan membuktikan hipotesa yang akan menjelaskan tentang pengaruh sanksi ekonomi terhadap Qatar dan mengapa sanksi ekonomi terhadap Qatar oleh Arab Saudi dinilai tidak efektif. Qatar mampu melakukan restrukturisasi ekonomi nasional dan juga menjalin hubungan dengan pihak ketiga.

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.